

**Pengaruh Destinasi Wisata dan Kearifan Lokal Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran (Studi Pada Program
Kawasan Wisata Rekreasi Pantai Pangandaran)
Emma Mulyani Rachman 1, Lia Muliawaty 2, Benyamin Harits 3**

Pengembangan pariwisata di Provinsi Jawa Barat direncanakan dan dikembangkan secara ramah lingkungan dengan tidak menghabiskan atau merusak sumber daya alam dan sosial, tetapi dipertahankan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan, salahsatunya di di Kawasan Wisata Rekreasi Wisata Pantai Pangandaran. Maksud penyelenggaraan kepariwisataan adalah dalam rangka menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang ada di daerah agar dapat berkembang secara optimal dan fungsional, selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Berdasarkan hasil penelian tentang Pengaruh Destinasi Wisata dan Kearifan Lokal terhadap Kepuasan Masyarakat pada tempat wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, sebagaimana telah dibahas sebelumnya tentang Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka secara komprehensif dapat disimpulkan sebagai berikut. Secara parsial variabel Destinasi Wisata telah memberi pengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat pada tempat wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, walaupun dilihat dari komponen-komponennya menunjukkan nilai yang cukup bervariasi. Secara parsial variabel Kearifan Lokal telah memberi pengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat pada tempat wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, walaupun dilihat dari ciri-cirinya menunjukkan nilai yang cukup bervariasi. Secara simultan variabel Destinasi Wisata dan Kearifan Lokal berpengaruh secara positif terhadap Kepuasan Masyarakat pada tempat wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Hal ini mengandung makna bahwa Destinasi Wisata dan Kearifan Lokal dapat meningkatkan Kepuasan Masyarakat pada tempat wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Kata Kunci : Destinasi wisata, Kearifan lokal, Kepuasan masyarakat

Abstract

Tourism development in West Java Province is planned and developed in an environmentally friendly manner by not consuming or damaging natural and social resources, but is maintained for sustainable use, one of which is in the Pangandaran Beach Recreational Tourism Area. The purpose of organizing tourism is to mobilize all tourism potential in the region so that it can develop optimally and functionally, in harmony with the religious and cultural values of the community. Based on the results of research on the Effect of Tourism Destinations and Local Wisdom on Community Satisfaction at tourist attractions in the work area of the Pangandaran Regency Tourism and Culture Office, as previously discussed regarding the Description of Research Results and Discussion, it can be comprehensively concluded as follows. Partially, the Tourism Destination variable has a positive influence on community satisfaction at tourist attractions in the work area of the Tourism and Culture Office of Pangandaran Regency, although seen from the components it shows quite varied values. Partially, the Local Wisdom variable has a positive influence on community satisfaction at tourist attractions in the work area of the Pangandaran Regency Tourism and Culture Office, although seen from its characteristics it shows quite varied values. Simultaneously, the variables of Tourism Destinations and Local

Wisdom have a positive effect on community satisfaction at tourist attractions in the work area of the Tourism and Culture Office of Pangandaran Regency. This implies that Tourism Destinations and Local Wisdom can increase Community Satisfaction at tourist attractions in the work area of the Tourism and Culture Office of Pangandaran Regency

Keywords: tourist destinations, local wisdom, community satisfaction

A. PENDAHULUAN

Pembangunan pariwisata di wilayah Jawa Barat yang berkelanjutan mengacu kepada prinsip terjaminnya keberlanjutan sumber daya pendukung pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia. Pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Barat memperhatikan daya dukung suatu ekosistem dalam menampung komponen biotik (makhluk hidup) yang terkandung di dalamnya, termasuk memperhitungkan faktor lingkungan dan faktor lainnya yang berperan di alam yang sangat bervariasi dan selalu bergantung pada tingkat pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia (Zainal, 2006). Pengembangan pariwisata di Provinsi Jawa Barat direncanakan dan dikembangkan secara ramah lingkungan dengan tidak menghabiskan atau merusak sumber daya alam dan sosial, tetapi dipertahankan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan (Robby, 2020).

Menurut Wardani, (2019) Destinasi wisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi andalan bagi setiap daerah dalam mengeksplorasi sumber daya ekonomi. Potensi pariwisata di Indonesia yang sangat melimpah terdiri dari ribuan pulau yang sudah terkenal akan keindahannya, berbagai macam suku bangsa dengan keunikannya tersendiri, yang memiliki potensi alam, sosial, dan budaya menjadi modal utama bagi pemerintah untuk memajukan sektor pariwisata agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya (Nevizond, 2007). Menurut Piagam Pariwisata Berkelanjutan tahun 1995, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah pembangunan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial. Jawa Barat terkenal dengan panorama yang indah, kebudayaan yang melimpah, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, dan akses infrastruktur yang mulai terkoneksi satu dengan yang lain. Hal ini membuat Jawa Barat menjadi destinasi menarik bagi banyak wisatawan, baik nasional maupun mancanegara (William, 2000).

Menurut UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Bab I Ketentuan Umum, dijelaskan definisi mengenai Kawasan Pariwisata, yaitu kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Definisi tersebut lebih mengacu pada kawasan pariwisata yang berbentuk resor (resort), yang usaha kawasannya dikelola oleh perseroan terbatas atau koperasi. Pengembangan Destinasi Wisata Kelas Dunia Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat difokuskan pada pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) dikelompokkan berdasarkan faktor faktor pengikat kawasan, serta konsep dan teori dalam pengembangan kawasan wisata. Identifikasi potensi dan permasalahan masing-masing KWU Kabupaten Pangandaran merupakan dasar dalam penyusunan prioritas program pengembangan yang sesuai untuk masing-masing kawasan tersebut. Berdasarkan hasil kajian terhadap

kebijakan pariwisata Jawa Barat dan yang terkait, bentuk-bentuk perwilayahan pariwisata yang membagi habis wilayah administratif ke dalam Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPW), Satuan Kawasan Wisata (SKW), dengan cluster Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dirasakan kurang efektif karena tidak atau kurang memberikan arahan yang jelas untuk mengimplementasikan perencanaan pariwisata di tingkat provinsi (Milton, 2000).

Dalam Undang-undang tersebut di atas dijelaskan bahwa industri pariwisata adalah kumpulan pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Sehingga pengertian pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan adanya tarik wisata serta usaha-usaha terkait dibidang tersebut daya tarik obyek wisata tergantung kepada pelayanan yang diberikan, serta fasilitas dan daya tarik lainnya, untuk menarik daya tarik pengunjung wisata serta usaha-usaha terkait dibidang tersebut.

Destinasi wisata sebagai aspek yang berkaitan dengan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan data BPS (2021), terdapat penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,02 juta kunjungan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,03 persen. Berdasarkan kebangsaannya, terdapat 5 negara yang paling banyak berkunjung ke Indonesia pada tahun 2020 yaitu Timor Leste, Malaysia, Singapura, Australia, dan China. Sebagian besar negara-negara tersebut adalah negara tetangga, kecuali China (Henky, 2011).

Pandemic terjadi kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali terkonfirmasi pada awal Maret tahun 2020 (Ihsannudin, 2020 dalam *Nasional Kompas*). Sejak saat itu pandemi ini cepat menyebar hingga ke seluruh wilayah di Indonesia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019 lalu (WHO). Virus ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Adapun penyebaran COVID-19 sangat berdampak bukan hanya pada kegiatan ekonomi dan bidang transportasi tetapi juga pada dirasakan oleh industri pariwisata. Total kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia adalah 1.111.671 per tanggal 3 Februari 2021 (*News Google*, 2021). Jumlah ini terus mengalami kenaikan dari hari ke hari dibuktikan dengan bentuk kurva yang cenderung masih menanjak.

Beberapa kebijakan telah diupayakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memulihkan sektor pariwisata dengan tetap berfokus pada pemulihan kesehatan. Terkait pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di masa depan. Pemerintah telah menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 10 April 2020 untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di sejumlah wilayah Indonesia (Benyamin, 2002). Aturan mengenai PSBB tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yaitu tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang merujuk ke UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (CNN Indonesia, 2021). Penerapan PSBB mengatur agar aktivitas sekolah, kerja, ibadah dilakukan di rumah, sedangkan tempat hiburan, wisata dan pusat perbelanjaan ditutup. Selain itu, hanya tempat usaha yang menyediakan

kebutuhan pokok yang diperbolehkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan. Selama penerapan PSBB, operasional moda transportasi dibatasi dan warga dilarang keluar dari wilayah PSBB.

Saat ini pemerintah tidak lagi menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetapi menggantinya dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri. Kebijakan PPKM diberlakukan seiring pengetatan protokol kesehatan di sebagian daerah di Jawa-Bali yaitu DIY, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali pada 11-25 Januari 2021 yang kemudian diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Menurut data BPS 2020 sekitar 409 ribu tenaga kerja di sector pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pandemic COVID 19 (Irfan, 2001).

Beberapa upaya dilakukan untuk menyelamatkan destinasi wisata di Indonesia. Ada 3 (tiga) fase penyelamatan yang dilakukan yaitu : tanggap darurat, Pemulihan dan Normalisasi. Fase tanggap darurat difokuskan pada sector kesehatan dalam hal ini menginisiasi program perlindungan sosial, mendorong kreativitas dan produktivitas saat WFH, melakukan koordinasi krisis pariwisata dengan daerah pariwisata serta persiapan pemulihan (Prabu, 2005). Selanjutnya dalam fase pemulihan diberlakukannya secara bertahap tempat wisata di Indonesia. Kesiapan yang sangat matang yang dilakukan adalah penerapan protocol CHSE (*Cleanliness, Healthy, Safety and Environmental Sustainability*) di tempat wisata serta pendukung yang menoptimalisasi kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*) di Indonesia.

Inovasi kebijakan publik menjadi keharusan ketika kebijakan manual yang hanya berfungsi sekedar menggugurkan kewajiban pemerintah melahirkan berbagai kekecewaan dan kecemasan ditengah-tengah publik, khususnya yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025 kepariwisataan daerah merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai agama, budaya, kelestarian dan mutu lingkungan hidup. Dalam rangka memberikan dasar kebijakan terhadap isu strategis dalam pembangunan kepariwisataan yang memberikan gambaran kondisi dan situasi perkembangan kepariwisataan di daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (Handy, 2002).

Maksud penyelenggaraan kepariwisataan adalah dalam rangka menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang ada di daerah agar dapat berkembang secara optimal dan fungsional, selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Serta Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan yaitu tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjelaskan bahwa pariwisata adalah "Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kecenderungan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup yang ada pada akhirnya akan menuntut kualitas pelayanan dan kepuasan dalam berbagai hal, terutama pemerintah sebagai institusi pelayan masyarakat tidak lepas dari tuntutan adanya perbaikan dan peningkatan dari kualitas pelayanan tersebut. Masyarakat pun menjadi dinamis dan aktif dengan timbulnya berbagai tuntutan yang salah satunya menyoroti

kualitas di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut seharusnya dapat menjadi bahan koreksi kearah yang lebih baik, aparat dituntut untuk berpihak pada kepentingan masyarakat dan berorientasi kepada kualitas pelayanan sehingga tercapainya kepuasan masyarakat. Berdasarkan peninjauan serta temuan permasalahan berkaitan dengan kepuasan masyarakat/pelanggan masih rendah tersebut diduga oleh pengaruh destinasi wisata dan kearifan lokal yang belum dapat terlaksana secara optimal oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

B. METODE

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut Arikunto (1998:388), untuk melakukan analisis data digunakan teknik statistik deskriptif yang berfungsi untuk mengelompokan data, memproses, menyimpulkan, memaparkan serta menyajikan hasil olahan. Hal ini bertujuan penelitian yang akan menjelaskan hubungan antar variabel. Hubungan-hubungan antar variable sebelumnya diadakan pengujian, maka setiap variable akan diukur dan dijabarkan melalui operasional variabel. Untuk mendapatkan data pada penelitian ini dipergunakan cara-cara seperti, penelitian kepustakaan, penelitian ini diperlukan untuk mengumpulkan data sekunder serta teori-teori yang diperlukan untuk menunjang, melengkapi, dan menyempurnakan data primer. Kemudian observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan lapangan terhadap obyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Kabid Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kabid Destinasi Pariwisata dan Kabid Analisa dan Pemasaran Pariwisata. Untuk memperoleh data primer ini digunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket yaitu berupa daftar pernyataan tersruktur yang diajukan pada responden yang terpilih sebagai sampel. Adapun model angket yang digunakan adalah angket tertutup dan terbuka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Parsial Destinasi Wisata terhadap Kepuasan Masyarakat/Pelanggan di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran

Pembahasan dalam menganalisis hasil penelitian dengan analisis SEM ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan analisis *standardized solution* dan *t value*. Pendekatan analisis *standardized solution* dilakukan untuk melihat analisis yang bersifat positif dan negatif, serta menentukan hubungan antar variabel. Sedangkan pendekatan analisis *t value* untuk melihat hasil analisis dalam menentukan signifikansi dan non signifikan. Kedua pendekatan analisis ini mempunyai fungsi yang berbeda, di mana setiap fungsi itu saling terkait satu sama lainnya.

Berangkat pada Sub Struktur Model Standarized Solution Variabel X1 yang ditentukan oleh X₁₋₁ sampai dengan X₁₋₄ yang memiliki pengaruh terhadap Y, bahwa nilai standar loading faktor Destinasi Wisata terhadap Kepuasan masyarakat/Pelanggan adalah 0,55. Berpatokan pada nilai loading faktor tersebut, variabel Destinasi Wisata yang terdiri dari komponen daya tarik (*attraction*), komponen aksesibilitas, komponen fasilitas

(*amenities*), dan komponen lembaga pengelola (*institutions*) berpengaruh positif terhadap Kepuasan Masyarakat/Pelanggan di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran. Dilihat dari nilai *t-value*, besaran nilai Destinasi Wisata terhadap Kepuasan Masyarakat/Pelanggan sebesar 2,94. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Destinasi Wisata yang terdiri dari komponen daya tarik (*attraction*), komponen aksesibilitas, komponen fasilitas (*amenities*), dan komponen lembaga pengelola (*institutions*) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat/Pelanggan di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan ulasan di atas, dapat dinyatakan bahwa variabel Destinasi Wisata yang terdiri dari empat Komponen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat/Pelanggan di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran. Pernyataan tersebut memberi makna bahwa pengembangan destinasi wisata di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat ataupun pelanggan/pengunjung yang sedang berada di Kabupaten Pangandaran, sehingga memberi dorongan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran untuk menciptakan kawasan wisata yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Analisis di atas, telah pula didukung hasil observasi dan wawancara yang menyatakan bahwa masyarakat dan pengunjung merasakan efek positif dari pengembangan destinasi wisata yang telah dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Penelitian ini menggunakan teori yang dijadikan analisis penelitian, sumber acuan penelitian ini mengacu pada pendapat Supriadi (2017: 38) yang terdiri dari komponen-komponen destinasi wisata, antara lain: komponen daya tarik (*attraction*), komponen aksesibilitas, komponen fasilitas (*amenities*), dan komponen lembaga pengelola (*institutions*). Keempat komponen ini menjadi acuan peneliti dalam mengkaji besarnya pengaruh Destinasi Wisata yang dilakukan pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Setiap institusi pemerintah dalam mengimplementasikan kegiatannya akan berbeda hasil dan targetnya, sehingga berbeda pula masalah yang dihadapinya. Untuk pembahasan lebih dalam tentang pengaruh destinasi wisata pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandarn, maka peneliti mengkaji dan menganalisis komponen-komponen destinasi wisata tersebut secara lebih detail dan mendalam pada paragraf pembahasan komponen destinasi wisata melalui sub bab di bawah ini.

Komponen daya tarik (*attraction*) dalam mengukur Destinasi Wisata pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berdasarkan struktur model utama *standardized solution* berdasarkan hasil pengumpulan data melalui angket yang diwakili oleh 150 responden mampu menjelaskan sebesar 0,51. Sedangkan dilihat dari struktur model utama *t-value*, besaran nilai komponen daya tarik (*attraction*) sebesar 6,44, artinya bahwa komponen daya tarik (*attraction*) merupakan komponen yang tepat untuk mengukur Destinasi Wisata pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Komponen daya tarik (*attraction*) yang terdiri dari indikator: aspek keunikan, aspek keindahan dan aspek kelengkapan, telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, sehingga mampu meningkatkan Kepuasan Masyarakat/Pelanggan pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran secara menyeluruh. Komponen daya tarik (*attraction*) dimaksud merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai bagaimana

masyarakat/pelanggan/pengunjung melihat motivasi dalam melakukan perjalanan wisata pada sebuah kawasan wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebagai subyek yang merasakan manfaat dari sebuah tempat wisata. Penggunaan komponen daya tarik ini merupakan suatu cara yang digunakan dinas untuk melihat sebuah objek wisata apakah memberikan sesuatu yang menarik bagi pengunjung, sehingga pengunjung bersedia untuk tinggal lebih lama ataupun bersedia untuk datang kembali di kemudian hari (Mahmudi, 2005).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen daya tarik (*attraction*) berdasarkan pada aspek keunikan, menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah memberikan keunikan dan iri khas tersendiri bagi setiap obyek wisata yang ada, salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lokal yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu, seperti Pangandaran International KITE Festival, Ruwat Jagat Sila Saamparan, Balawisata International Workshop and Competition dan lain sebagainya. Komponen daya tarik (*attraction*) berdasarkan pada aspek keindahan, menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah melakukan perawatan terhadap keindahan sumber daya alam dan perbaikan sumber daya buatan, sehingga nuansa keindahan dan keasrian lingkungan tetap terjaga dengan baik. Komponen daya tarik (*attraction*) didasarkan pada aspek kelengkapan, bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah melakukan peningkatan dan perawatan sarana dan prasarana yang ada didalam area kawasan wisata untuk memudahkan wisatawan dalam menikmati objek wisata.

Hasil penelitian di atas, tampak telah memberikan informasi bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah menjalankan tugasnya sesuai dengan alat bantu pengembangan destinasi wisata komponen daya tarik (*attraction*) berdasarkan pada aspek keunikan, yaitu memberikan ciri dan tingkat keunikan tersendiri pada sebuah obyek wisata yang bisa memunculkan minat wisatawan untuk datang ke tempat wisata. Sementara komponen daya tarik (*attraction*) dalam bentuk aspek keindahan, bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandarn telah menyajikan dan menjaga serta meningkatkan keindahan alam dan keindahan buatan suatu objek wisata sehingga menimbulkan minat ketertarikan wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata. Begitu pula komponen daya tarik (*attraction*) dalam bentuk aspek kelengkapan, bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebagai lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan memadai, sehingga wisatawan merasa nyaman selama berada di tempat wisata tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut tampak bahwa pelaksanaan pengembangan Destinasi Wisata telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan komponen daya tarik (*attraction*) dengan mengacu pada aspek keunikan, aspek keindahan dan aspek kelengkapan untuk pencapaian kepuasan masyarakat/pelanggan/pengunjung selama menikmati kawasan wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Adapun komponen aksesibilitas dalam mengukur Destinasi Wisata pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berdasarkan struktur model utama *standardized solution* berdasarkan hasil pengumpulan data melalui angket yang diwakili oleh 150 responden mampu menjelaskan sebesar 0,74. Sedangkan dilihat dari struktur model utama *t-value*, besaran nilai komponen aksesibilitas

sebesar 10,25, artinya bahwa komponen aksesibilitas merupakan komponen yang tepat untuk mengukur Destinasi Wisata pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Komponen aksesibilitas yang terdiri dari indikator: kategori jalan, jarak ke pusat kota dan kemudahan serta kelancaran, telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, sehingga mampu meningkatkan Kepuasan Masyarakat/Pelanggan pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen aksesibilitas berdasarkan pada kategori jalan, menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah memberikan akses fasilitas jalan yang baik dan mudah dilalui oleh kendaraan yang dilengkapi pula dengan petunjuk jalan yang dapat dipahami oleh wisatawan. Komponen aksesibilitas ini berdasarkan pada aspek jarak ke pusat kota, menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah menciptakan objek wisata yang dekat dengan pusat kota sehingga memudahkan wisatawan dalam memperoleh akses ke berbagai hal penting. Komponen aksesibilitas didasarkan pada kemudahan dan kelancaran, bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah melakukan berbagai kemudahan dan kelancaran administrasi maupun aktivitas lainnya sehingga memudahkan wisatawan untuk mendapatkan akses sesuai dengan kepentingannya.

Komponen fasilitas (*amenities*) dalam mengukur Destinasi Wisata pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berdasarkan struktur model utama *standardized solution* berdasarkan hasil pengumpulan data melalui angket yang diwakili oleh 150 responden mampu menjelaskan sebesar 0,71. Sedangkan dilihat dari struktur model utama *t-value*, besaran nilai komponen fasilitas (*amenities*) sebesar 9,76, artinya bahwa komponen fasilitas (*amenities*) merupakan komponen yang tepat untuk mengukur Destinasi Wisata pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Komponen fasilitas (*amenities*) yang terdiri dari indikator: fasilitas penginapan, fasilitas umum dan fasilitas parkir, telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, sehingga mampu meningkatkan Kepuasan Masyarakat/Pelanggan pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran diketahui bahwa: Pertama, komponen fasilitas (*amenities*) berorientasi pada fasilitas penginapan, telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ini terlihat dari banyaknya pilihan tempat menginap yang disediakan baik itu yang dikelola pemerintah ataupun swasta. Kedua, komponen fasilitas (*amenities*) yang berorientasi pada fasilitas umum, telah dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan menyediakan berbagai macam fasilitas umum untuk memudahkan wisatawan dalam beraktivitas selama di tempat wisata. Ketiga, komponen fasilitas (*amenities*) yang berorientasi pada fasilitas parkir, bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menyediakan lahan parkir yang cukup dan luas bagi tempat penyimpanan kendaraan wisatawan baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi selama berada di tempat wisata (Moenir, 2006).

Komponen lembaga pengelola (*institutions*) dalam mengukur Destinasi Wisata pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berdasarkan struktur model utama *standardized solution* berdasarkan hasil pengumpulan

data melalui angket yang diwakili oleh 150 responden mampu menjelaskan sebesar 0,89. Sedangkan dilihat dari struktur model utama *t-value*, besaran nilai komponen lembaga pengelola (*institutions*) sebesar 13,52, artinya bahwa komponen lembaga pengelola (*institutions*) merupakan komponen yang tepat untuk mengukur Destinasi Wisata pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Komponen lembaga pengelola (*institutions*) yang terdiri dari indikator: pihak pemerintah, pihak swasta dan pihak investor, telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, sehingga mampu meningkatkan Kepuasan Masyarakat/Pelanggan pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran secara menyeluruh. Berdasarkan analisis tersebut tampak bahwa pelaksanaan pengembangan Destinasi Wisata telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan komponen lembaga pengelola (*institutions*) dengan mengacu pada pihak pemerintah, pihak swasta dan pihak investor untuk pencapaian kepuasan masyarakat/pelanggan/pengunjung selama menikmati kawasan wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Pengaruh Parsial Kearifan Lokal terhadap Kepuasan Masyarakat/Pelanggan di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran

Pembahasan dalam menganalisis hasil penelitian dengan analisis SEM ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan analisis *standardized solution* dan *t value*. Pendekatan analisis *standardized solution* dilakukan untuk melihat analisis yang bersifat positif dan negatif, serta menentukan hubungan antar variabel. Sedangkan pendekatan analisis *t value* untuk melihat hasil analisis dalam menentukan signifikansi dan non signifikan. Kedua pendekatan analisis ini mempunyai fungsi yang berbeda, di mana setiap fungsi itu saling terkait satu sama lainnya.

Berangkat pada Sub Struktur Model Standarized Solution Variabel X_2 yang ditentukan oleh X_{2-1} sampai dengan X_{2-5} yang memiliki pengaruh terhadap Y, bahwa nilai standar loading faktor Kearifan Lokal terhadap Kepuasan Masyarakat/Pelanggan adalah 0,44. Berpatokan pada nilai loading faktor tersebut, variabel Kearifan Lokal yang terdiri dari ciri mempunyai kemampuan mengendalikan, ciri mempunyai kemampuan ciri benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar, ciri mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya, ciri mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya, dan ciri mempunyai kemampuan mengintegrasikan budaya luar dan budaya asli berpengaruh positif terhadap Kepuasan Masyarakat/Pelanggan di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran. Dilihat dari nilai *t-value*, besaran nilai Kearifan Lokal terhadap Kepuasan Masyarakat/Pelanggan sebesar 2,60.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Kearifan Lokal yang terdiri dari ciri mempunyai kemampuan mengendalikan, ciri mempunyai kemampuan ciri benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar, ciri mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya, ciri mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya, dan ciri mempunyai kemampuan mengintegrasikan budaya luar dan budaya asli berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat/Pelanggan di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran.

Ciri kemampuan mengendalikan dalam mengukur Kearifan Lokal pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berdasarkan struktur model utama *standardized solution* berdasarkan hasil pengumpulan data melalui angket

yang diwakili oleh 150 responden mampu menjelaskan sebesar 0,94. Sedangkan dilihat dari struktur model utama *t-value*, besaran nilai ciri kemampuan mengendalikan sebesar 15,35, artinya bahwa ciri kemampuan mengendalikan merupakan ciri yang tepat untuk mengukur Kearifan Lokal pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Ciri kemampuan mengendalikan yang terdiri dari indikator: tidak merugikan orang lain dan dapat diterima masyarakat telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, sehingga mampu meningkatkan Kepuasan Masyarakat/Pelanggan pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri kemampuan mengendalikan berdasarkan pada aspek tidak merugikan orang lain, menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah mengkreasikan dan empromosikan kearifan lokal tanpa merugikan pihak lain khususnya pengunjung. Ciri kemampuan mengendalikan berdasarkan pada aspek dapat diterima masyarakat, menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam mengkreasikan dan mempromosikan kearifan lokal mendapat dukungan dan persetujuan dari masyarakat dan dianggap diterima dengan baik oleh pengunjung, sehingga pengunjung merasa aman dan nyaman dengan kearifan lokal yang ditawarkan.

Ciri benteng pertahanan dari pengaruh budaya luar dalam mengukur Kearifan Lokal pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berdasarkan struktur model utama *standardized solution* berdasarkan hasil pengumpulan data melalui angket yang diwakili oleh 150 responden mampu menjelaskan sebesar 0,93. Sedangkan dilihat dari struktur model utama *t-value*, besaran nilai ciri benteng pertahanan dari pengaruh budaya luar sebesar 14,93, artinya bahwa ciri benteng pertahanan dari pengaruh budaya luar merupakan ciri yang tepat untuk mengukur Kearifan Lokal pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Ciri benteng pertahanan dari pengaruh budaya luar yang terdiri dari indikator: dapat menjaga pengaruh luar dan dapat mempertahankan budaya lokal telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, sehingga mampu meningkatkan Kepuasan Masyarakat/Pelanggan pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis tersebut tampak bahwa pelaksanaan pelestarian Kerifan Lokal telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan ciri benteng pertahanan dari pengaruh budaya luar dengan mengacu pada aspek dapat menjaga pengaruh luar dan aspek dapat mempertahankan budaya lokal untuk pencapaian kepuasan masyarakat/pelanggan/pengunjung selama menikmati kawasan wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Ciri mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya dalam mengukur Kearifan Lokal pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berdasarkan struktur model utama *standardized solution* berdasarkan hasil pengumpulan data melalui angket yang diwakili oleh 150 responden mampu menjelaskan sebesar 0,95 (Riant, 2004).

Sedangkan dilihat dari struktur model utama *t-value*, besaran nilai ciri mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya sebesar 15,57, artinya bahwa ciri mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya merupakan ciri yang tepat untuk mengukur Kearifan Lokal pada wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Ciri mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya yang terdiri dari

indikator: melakukan integrasi unsur budaya dan dapat menyesuaikan budaya luar telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, sehingga mampu meningkatkan Kepuasan Masyarakat/Pelanggan pada wiyah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya berdasarkan pada aspek melakukan integrasi unsur budaya, menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah melakukan akulturasi budaya antara budaya luar dan lokal sehingga ketika pelaksanaan penerapan budaya tidak saling bertentangan antara budaya luar dan budaya lokal. Ciri mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya berdasarkan pada aspek dapat menyesuaikan budaya luar, menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah mengatur kebiasaan dan budaya wisatawan untuk disesuaikan dengan budaya lokal yang ada khususnya di tempat-tempat yang sifatnya sakral/suci, tetapi jika di tempat yang umum pembatasan budaya luar lebih longgar agar ada kenyamanan bagi wisatawan.

Hasil penelitian di atas, tampak telah memberikan informasi bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah menjalankan tugasnya sesuai dengan alat bantu pelestarian kearifan lokal pada ciri mempunyai kemampuan mengintegrasikan budaya luar dan budaya asli berdasarkan pada aspek mampu menyatukan budaya luar, yaitu proses akulturasi budaya lokal dan budaya luar pada hal-hal yang saling mendukung. Sementara ciri mempunyai kemampuan mengintegrasikan budaya luar dan budaya asli dalam bentuk aspek memperhatikan pengaruh globalisasi, bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah mengatur akulturasi dengan menggunakan pendekatan efek globalisasi yang saat ini terjadi sehingga proses akulturasi bisa dilaksanakan dengan baik tanpa ada gangguan.

Sebagaimana diketahui bahwa variabel Destinasi Wisata dan Kearifan Lokal merupakan variabel berpengaruh, yaitu variabel bebas yang mempengaruhi Kepuasan Masyarakat pada Tempat Wisata di Wilayah Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Sementara itu tempat wisata di dalam pengelolaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran merupakan obyek penelitian, di mana peneliti melakukan penelitian dan sumber-sumber data serta informasi dalam penelitian. Adapun teknik analisis data untuk menguji model dan hipotesis yang digunakan adalah Analisis *Structural Equation Model* (SEM). Tujuan dari penggunaan analisis SEM ini dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara variabel laten dengan variabel indikatornya, hubungan antara variabel laten yang satu dengan variabel laten yang lain, juga untuk mengetahui besarnya kesalahan pengukuran dalam penelitian disertasi ini.

Pengembangan Destinasi Wisata yang diberlakukan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran meliputi komponen-komponen: Daya Tarik (*Attraction*), Aksesibilitas, Fasilitas (*Amenities*) dan Lembaga pengelola (*Institutions*). Komponen daya tarik berkaitan dengan: aspek keunikan, aspek keindahan dan aspek kelengkapan. Komponen aksesibilitas berkaitan dengan: kategori jalan, jarak ke pusat kota, dan kemudahan serta kelancaran. Komponen fasilitas berkaitan dengan fasilitas penginapan, fasilitas umum dan fasilitas parkir. Komponen lembaga pengelola berkaitan dengan: pihak pemerintah, pihak swasta dan pihak investor.

Komponen-komponen di atas, telah dibahas secara gamblang dalam analisis parsial yang secara jelas telah menunjukkan hasil-hasil penelitian positif dan signifikan berkaitan dengan hasil penelitian yang terkait dengan Destinasi Wisata pengaruhnya terhadap Kepuasan Masyarakat pada tempat wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Di samping Destinasi Wisata, variabel penting lain yang menimbulkan kinerja efektif, yaitu Kearifan Lokal. Ciri-ciri di atas telah dibahas secara mendalam pada analisis parsial yang secara jelas telah menunjukkan hasil-hasil penelitian positif dan signifikan berkaitan dengan hasil penelitian yang terkait dengan kategori Kearifan Lokal pada tempat wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Secara keseluruhan pengaruh simultan destinasi wisata dan kearifan lokal terhadap kepuasan masyarakat pada tempat wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran cukup signifikan, yaitu sebesar 94%, artinya variabel destinasi wisata dan kearifan lokal sangat dominan mempengaruhi kepuasan masyarakat pada tempat wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitan tentang Pengaruh Destinasi Wisata dan Kearifan Lokal terhadap Kepuasan Masyarakat pada tempat wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, sebagaimana telah dibahas pada Bab IV tentang Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka secara komprehensif dapat disimpulkan sebagai berikut. Secara parsial variabel Destinasi Wisata telah memberi pengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat pada tempat wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, walaupun dilihat dari komponen-komponennya menunjukkan nilai yang cukup bervariasi. Secara parsial variabel Kearifan Lokal telah memberi pengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat pada tempat wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, walaupun dilihat dari ciri-cirinya menunjukkan nilai yang cukup bervariasi. Secara simultan variabel Destinasi Wisata dan Kearifan Lokal berpengaruh secara positif terhadap Kepuasan Masyarakat pada tempat wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Hal ini mengandung makna bahwa Destinasi Wisata dan Kearifan Lokal dapat meningkatkan Kepuasan Masyarakat pada tempat wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Di samping itu dalam penelitian ini juga ditemukan adanya variabel-variabel lain di luar Destinasi Wisata dan Kearifan Lokal yang berpengaruh terhadap Kepuasan Masyarakat pada tempat wisata di wilayah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik. Jakarta: Suara Bebas.
2. Ardiwidjaja, Robby. 2020. Kebijakan Strategis Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dirjen Kemenkeraf. Ekonomi Bisnis.
3. Chatab, Nevizond, 2007. Profil Budaya Organisasi, Mendiagnosis Budaya dan Merangsang Perubahannya. Bandung: ALABETA, cv.

4. Dunn, William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Darwin, Muhajir. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
5. Edward III, Milton J. 2000. *Implementing Public Policy*. Connecticut Kumarian Press
6. Harits, Benyamin. 2002. Paradigma Baru Dimensi-Dimensi Prima Administrator Publik. Bandung: Lemlit Unpas Press.
7. Hermantoro, Henky. (2011). *Creative-based tourism: dari wisata rekreatif menuju wisata kreatif*. Jakarta: Aditri
8. Irawan, Handy. 2002. *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Jakarta : Elex Media Komputindo
9. Islamy, M. Irfan. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
10. Mahmudi.2005.Manajemen Kerja Sektor Publik.Yogyakarta:UPP MAP
11. Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta :PT. Gramedia.
12. Moenir, H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.
13. Nugroho Dwijowijoto, Riant. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta: PT. Elex Media Komputindo.
14. Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Bandung : Alfabeta